

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KLEPTOKRASI SEBAGAI BENTUK LANJUTAN OLIGARKI DALAM PERSPEKTIF MARXIAN DI INDONESIA

Dayinta Hutabarat¹, Christian Samuel Pangaribuan²

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received : April 2025

Revised : April 2025

Accepted : April 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹dayinta123@icloud.com

²christiansamuel2102@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

This study examines the phenomenon of kleptocracy as a continuation of oligarchy within the political and economic context of post-reform Indonesia, using class theory through a Marxian perspective. The 1998 Reform, which initially aimed to foster democratization, instead led to a new concentration of power in the hands of political and economic elites. Through their dominance over state institutions, these elites exploit formal democratic mechanisms to perpetuate power and systematically plunder state resources. This research employs a qualitative method through literature review and critical analysis of discourse and the socio-political class structure. The findings reveal that kleptocracy in Indonesia is not merely an individual deviation but part of a broader capitalist system that enables elites to accumulate wealth through power relations and state instruments. From a Marxian standpoint, the state is not a neutral institution but a tool of the dominant class used to maintain hegemony and create false consciousness among the public. This study highlights the urgency of structural reform and class consciousness to promote genuine social justice within Indonesian democracy.

Keywords: Kleptocracy, Oligarchy, Marxian Perspective.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena kleptokrasi sebagai kelanjutan dari oligarki dalam konteks politik-ekonomi Indonesia pasca-reformasi, dengan pendekatan teori kelas dalam perspektif Marxian. Reformasi 1998 yang semula bertujuan menciptakan demokratisasi justru memunculkan konsentrasi kekuasaan baru di tangan elite politik-ekonomi. Melalui dominasi terhadap institusi negara, elite ini memanfaatkan mekanisme demokrasi formal untuk melanggengkan kekuasaan dan menjarah sumber daya negara secara sistematis. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis kritis terhadap wacana serta struktur kelas sosial-politik. Temuan menunjukkan bahwa kleptokrasi di Indonesia bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan bagian dari sistem kapitalisme yang memungkinkan elite mengakumulasi kekayaan melalui relasi kuasa dan instrumen negara. Negara dalam perspektif Marxian tidak netral, melainkan alat kelas dominan untuk mempertahankan hegemoni dan menciptakan kesadaran palsu pada masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi struktural dan kesadaran kelas untuk mendorong keadilan sosial yang sejati dalam demokrasi Indonesia.

Kata kunci: Kleptokrasi, Oligarki, Perspektif Marxian.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasca-reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan dan kepemilikan. Reformasi yang awalnya diharapkan mendorong demokratisasi dan pemerataan justru melahirkan konsentrasi kekuasaan baru. Sistem politik terdesentralisasi membuka peluang bagi elite lokal dan nasional untuk menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Privatisasi aset negara dan liberalisasi ekonomi memperkuat dominasi kelompok tertentu, sementara rakyat kecil tetap terpinggirkan. Struktur kepemilikan yang timpang ini mencerminkan pergeseran dari otoritarianisme terpusat ke bentuk kekuasaan yang lebih terdistribusi namun tetap elitis.

Menurut As'ad (2023) dominasi elite politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan negara semakin nyata di era pasca-reformasi. Elite ini, yang terdiri dari politisi, pejabat tinggi, dan pengusaha besar, membentuk jaringan oligarkis yang mengendalikan kebijakan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Representasi formal dalam institusi-institusi demokrasi, seperti partai politik dan parlemen, kerap kali menjadi alat untuk memperkuat jaringan patronase dan oligarki yang melayani kepentingan kapital. Akibatnya, kebijakan negara cenderung menguntungkan segelintir orang dan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas.

Teori yang dikemukakan oleh Ismayani (2022) fenomena korupsi sistemik dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elite menjadi ciri utama sistem ini. Korupsi tidak lagi sekedar penyimpangan individu, melainkan telah tertanam dalam struktur pengambilan keputusan. Praktik kolusi antara pejabat publik dan pelaku bisnis menciptakan akumulasi kekayaan yang ekstrim, seperti terlihat dari meningkatnya jumlah miliarder di tengah kemiskinan yang masih meluas. Kesenjangan sosial-ekonomi ini menunjukkan bagaimana sistem mempertahankan ketimpangan melalui mekanisme yang terorganisir.

Dalam buku yang ditulis oleh Koho (2021) Sejarah oligarki dan kleptokrasi di Indonesia dapat ditelusuri sejak era kolonial, namun puncaknya terjadi pada masa Orde Baru. Rezim Soeharto membangun sistem kronisme yang memungkinkan elite tertentu menguasai sumber daya negara. Pasca-reformasi, oligarki ini tidak lenyap, melainkan bertransformasi ke dalam sistem demokrasi yang lebih terbuka namun tetap rentan terhadap penyalahgunaan. Kleptokrasi, sebagai bentuk lanjutan oligarki, muncul ketika elite secara sistematis mengeksploitasi institusi negara untuk kepentingan pribadi.

Praktik kleptokrasi tumbuh subur di tengah sistem demokrasi formal yang lemah. Pemilu yang mahal dan politik uang memperkuat ketergantungan politisi pada sponsor korporasi, yang pada gilirannya menuntut imbalan berupa kebijakan atau proyek tertentu. Sistem ini menciptakan lingkaran setan di mana elite politik dan ekonomi saling menguntungkan, sementara akuntabilitas publik melemah. Institusi penegak hukum sering kali dikompromikan, memungkinkan praktik kleptokrasi berlangsung tanpa hambatan signifikan.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hanifan (2025) terkait dengan hubungan antara oligarki politik-ekonomi dan kekuasaan negara terlihat jelas dalam penguasaan sumber daya strategis, seperti pertambangan, energi, dan infrastruktur. Elite ekonomi mendanai elite politik untuk memastikan akses terhadap kontrak atau lisensi negara, sementara elite politik

memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri dan jaringannya. Relasi simbiosis ini memperkuat struktur kekuasaan yang mengutamakan akumulasi kapital di atas kepentingan publik.

Dewasa ini, maraknya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan kegagalan sistemik dalam pemberantasan kleptokrasi. Faktor seperti lemahnya pengawasan, politisasi birokrasi, dan rendahnya integritas penegak hukum memperburuk situasi. Selain itu, kebijakan yang berpihak pada korporasi besar dan kurangnya transparansi dalam proyek strategis nasional menciptakan peluang bagi praktik korupsi yang terstruktur.

Contoh kasus kleptokrasi di Indonesia mencakup skandal Pertamina terkait pengelolaan dana yang tidak transparan, kasus Harvey Moeis yang melibatkan penyalahgunaan izin tambang, serta dugaan manipulasi dalam pengelolaan emas Antam. Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana elite memanfaatkan posisi dan jaringan untuk mengekstraksi keuntungan dari sumber daya negara, sering kali dengan melibatkan aktor lintas sektor, termasuk pejabat, pengusaha, dan bahkan penegak hukum. Skema-skema penggelapan dana, penambangan liar yang dilindungi kekuasaan, dan pencucian uang menjadi bagian dari sistem yang lebih besar dan terorganisir.

Menganalisis fenomena ini secara sosiologis, bukan hanya hukum atau politik, penting karena pendekatan sosiologis mampu mengungkap struktur sosial yang mendasari praktik kleptokrasi. Dalam buku yang ditulis oleh Mardizal (2024) menjelaskan bahwa hukum dan politik cenderung berfokus pada pelaku individu, sedangkan sosiologi memeriksa relasi kekuasaan, kelas, dan institusi yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Pendekatan ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ketimpangan sosial diciptakan dan dipertahankan.

Perspektif Marxian menjadi relevan karena menekankan pada relasi kelas dan dominasi dalam struktur politik-ekonomi. Dalam kerangka Marxian, kleptokrasi dapat dipahami sebagai ekspresi dari akumulasi kapital yang didukung oleh negara, di mana kelas penguasa memanfaatkan aparaturnya untuk mempertahankan hegemoni. Pendekatan ini tidak hanya melihat fenomena pada permukaan, tetapi berusaha menelusuri akar-akar material dan historis dari konflik kepentingan, eksploitasi kelas, serta mekanisme hegemonik yang menopang kekuasaan elite.

Kajian ini berkontribusi pada pemahaman sistem kekuasaan di negara berkembang, khususnya dalam konteks transisi demokrasi. Dengan menganalisis Indonesia sebagai studi kasus, penelitian ini menyoroti bagaimana oligarki dan kleptokrasi menghambat pembangunan yang inklusif. Temuan dari kajian ini dapat menjadi rujukan bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan demokrasi dan keadilan sosial.

Kesenjangan antara demokrasi formal dan praktik oligarki menjadi salah satu fokus utama penelitian ini. Meskipun Indonesia memiliki institusi demokratis seperti pemilu dan parlemen, praktik oligarki merusak esensi demokrasi dengan memusatkan kekuasaan pada elite. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana demokrasi formal dapat menghasilkan keadilan sosial tanpa reformasi struktural yang signifikan.

Minimnya pendekatan teoritis berbasis Marxian dalam membaca gejala kleptokrasi di Indonesia menjadi celah yang ingin diisi oleh penelitian ini. Sebagian besar analisis cenderung menggunakan kerangka liberal atau institusional, yang sering kali mengabaikan dimensi kelas dan kepemilikan. Pendekatan Marxian menawarkan lensa kritis untuk memahami bagaimana struktur politik-ekonomi menghasilkan ketimpangan sistemik. Sayangnya, minimnya pendekatan teoritis berbasis Marxian dalam studi-studi kontemporer tentang korupsi dan kekuasaan di Indonesia membuat pemahaman terhadap kleptokrasi kerap terjebak pada wacana moralistik atau legalistik. Padahal, kleptokrasi bukan hanya soal individu korup, melainkan soal struktur relasi kuasa dan ekonomi yang terorganisir.

Kurangnya fokus pada struktur kelas dan kepemilikan dalam analisis kekuasaan di Indonesia memperlemah upaya untuk memahami akar masalah kleptokrasi. Penelitian ini berargumen bahwa tanpa memeriksa bagaimana kelas penguasa mengendalikan alat produksi dan institusi negara, analisis kekuasaan akan tetap parsial dan kurang mampu menawarkan solusi yang mendasar.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kleptokrasi berkembang sebagai bentuk lanjutan dari oligarki dalam konteks sosial-politik di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Marxian dapat menjelaskan relasi kelas, dominasi, dan peran negara dalam menopang kleptokrasi di Indonesia?

Tinjauan Pustaka

Oligarki

Dalam teori yang dikemukakan oleh Nugroho (2024) oligarki merujuk pada sistem kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil individu, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar dan mendominasi dalam struktur pemerintahan. Sistem ini merupakan salah satu bentuk klasik dari organisasi kekuasaan yang telah dikenal sejak lama. Istilah "oligarki" berasal dari bahasa Yunani, di mana *oligoi* berarti "sedikit" atau "segelintir" dan *arche* berarti "pemerintahan" atau "kekuasaan". Dengan demikian, secara harfiah, oligarki dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok kecil orang.

Dalam praktiknya, oligarki sering kali memiliki konotasi negatif karena kekuasaan yang dipegang oleh kelompok kecil ini cenderung digunakan untuk memajukan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, bukan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dengan kata lain, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang tidak hanya dipimpin oleh segelintir orang, tetapi juga diarahkan untuk melayani kepentingan eksklusif kelompok tersebut.

Dalam bukunya Ridwan (2023) memiliki pandangan serupa dengan teori yang dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno, Aristoteles, yang mana mendefinisikan oligarki sebagai sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil cendekiawan atau elit. Menurutnya, kelompok ini memerintah dengan tujuan utama untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, sering kali mengabaikan kebutuhan atau aspirasi masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, oligarki menurut Aristoteles mencerminkan penyimpangan dari prinsip pemerintahan yang ideal, di mana kekuasaan seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama.

Teori lain, yang dikemukakan oleh Hidayat (2020) sependapat dengan Robert Michels yang menyatakan "Hukum Besi Oligarki" (*Iron Law of Oligarchy*), yang berarti bahwa setiap organisasi, termasuk yang demokratis, pada akhirnya akan dikuasai oleh sekelompok kecil elit. Menurutnya, struktur organisasi yang kompleks membuat kekuasaan terkonsentrasi pada pemimpin atau birokrat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses lebih besar, sehingga demokrasi sejati sulit tercapai.

Kleptokrasi

Kleptokrasi menurut Wikipedia (2025) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *kleptes* (pencuri) dan *kratia* (kekuasaan), yang secara harfiah berarti "pemerintahan oleh para pencuri." Kleptokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana para pemimpin atau elit penguasa menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok terdekat mereka melalui korupsi, penyalahgunaan dana publik, atau eksploitasi sumber daya negara. Dalam sistem ini, kepentingan pribadi diletakkan di atas kepentingan masyarakat, sehingga merugikan kesejahteraan umum dan melemahkan institusi negara.

Menurut buku yang ditulis oleh Ali (2023) menjelaskan bahwa istilah kleptokrasi pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh sosiolog Polandia-Britania, Stanislaw Andreski, melalui karyanya yang berpengaruh, *The African Predicament: A Study in the Pathology of Modernization* (1968). Dalam karya ini, Andreski secara mendalam menganalisis fenomena pemerintahan yang didominasi oleh korupsi sistematis, yang ia sebut sebagai kleptokrasi. Menurutnya, kleptokrasi adalah sistem pemerintahan di mana penguasa, pejabat tinggi, atau elit politik memanfaatkan posisi dan otoritas mereka untuk mengumpulkan kekayaan pribadi secara tidak sah. Fokus utama mereka bukanlah melayani kepentingan publik atau memajukan kesejahteraan masyarakat, melainkan memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan kekuasaan, seperti penggelapan dana publik, suap, atau manipulasi sumber daya negara.

Andreski menjelaskan bahwa para pemimpin dalam sistem kleptokrasi memiliki akses dan kekuatan yang luas untuk mengendalikan aset negara, yang memungkinkan mereka mengalihkan sumber daya publik ke kantong pribadi mereka. Sistem ini tidak hanya melibatkan individu korup, tetapi juga mencakup jaringan yang terorganisir, termasuk keluarga, sekutu, atau kroni, yang turut diuntungkan dari praktik korupsi tersebut. Dalam konteks ini, jabatan publik tidak lagi dilihat sebagai amanah untuk melayani rakyat, melainkan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan finansial dan mempertahankan dominasi kekuasaan.

Lebih lanjut, Andreski menyoroti dampak buruk kleptokrasi terhadap stabilitas dan perkembangan suatu negara. Ketika cabang-cabang kekuasaan utama legislatif, yudikatif, dan eksekutif dikuasai atau dipengaruhi oleh para pelaku korupsi, institusi negara kehilangan integritas dan independensinya. Parlemen yang seharusnya mewakili rakyat menjadi alat untuk mengesahkan keputusan yang menguntungkan elit, pengadilan kehilangan kemampuan untuk menegakkan hukum secara adil, dan pemerintahan eksekutif berfokus pada mempertahankan kepentingan pribadi daripada kebijakan publik yang inklusif. Akibatnya, negara yang dikuasai oleh kleptokrasi cenderung mengalami kemunduran ekonomi, meningkatnya ketimpangan sosial, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Dalam analisisnya, Andreski juga menggarisbawahi bahwa kleptokrasi bukan hanya sekadar korupsi sporadis, tetapi sebuah sistem yang terstruktur di mana korupsi menjadi inti dari operasi pemerintahan. Sistem ini menciptakan lingkaran setan: korupsi memperkuat kekuasaan elit, dan kekuasaan yang dipertahankan tersebut digunakan untuk memperluas praktik korupsi. Akibatnya, negara-negara yang terjatuh dalam kleptokrasi sering kali terperangkap dalam spiral kemerosotan, di mana sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur justru dialihkan untuk memperkaya segelintir individu. Hal ini tidak hanya memperburuk kemiskinan dan ketidakadilan, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan politik, membawa negara menuju titik terendah dalam hal tata kelola dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pandangan Andreski, fenomena kleptokrasi sering kali muncul dalam dan populer di negara-negara yang sedang berkembang, terutama yang baru merdeka dari penjajahan, seperti yang ia amati di beberapa negara Afrika pasca-kolonial. Ketidakstabilan politik, lemahnya institusi, dan warisan ketimpangan ekonomi dari era kolonial menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya kleptokrasi. Namun, ia juga memperingatkan bahwa fenomena ini tidak terbatas pada negara-negara tertentu, melainkan dapat terjadi di mana saja ketika pengawasan terhadap kekuasaan tidak memadai dan akuntabilitas publik melemah.

Secara keseluruhan, analisis Andreski tentang kleptokrasi memberikan kerangka penting untuk memahami bagaimana penyalahgunaan kekuasaan oleh elit dapat menghancurkan fondasi negara. Ia menegaskan bahwa ketika pemerintahan dijalankan oleh mereka yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, negara tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga terjebak dalam kemunduran yang sulit diatasi, menuju titik nadir tata kelola dan kesejahteraan kolektif.

Relasi Antara Oligarki Dan *Kleptokratis* Dalam Perspektif Marxian

Dalam kerangka teori Marxian, oligarki dan kleptokrasi merupakan ekspresi konkret dari dominasi kelas borjuis dalam sistem kapitalisme lanjut. Marx menegaskan bahwa negara bukanlah institusi yang netral atau mewakili kepentingan umum, melainkan alat represif kelas penguasa untuk menjaga dan mempertahankan struktur kepemilikan dan eksploitasi yang menguntungkan mereka. Negara dalam hal ini bukan semata-mata lembaga hukum atau pemerintahan, tetapi representasi dari kepentingan ekonomi-politik segelintir elite yang memiliki kontrol atas alat-alat produksi.

Oligarki, menurut perspektif ini dan teori yang dikembangkan oleh Poti (2020), bukan sekadar pemerintahan oleh segelintir orang, tetapi hasil dari konsentrasi modal dan kepemilikan ekonomi yang memungkinkan kelompok kecil tersebut mengendalikan proses politik. Mereka menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengendalikan media, partai politik, pemilu, dan kebijakan publik. Kelas kapitalis besar bisa "membeli" akses dan keputusan negara agar regulasi berpihak pada akumulasi kapital mereka. Ini menunjukkan bahwa demokrasi formal hanya menjadi ilusi yang menyamarkan struktur kekuasaan ekonomi yang sebenarnya.

Kleptokrasi, atau pemerintahan oleh para pencuri, dalam perspektif Marxian yang dijelaskan oleh Akhmad (2020) adalah bentuk lanjutan dari kontrol kelas atas negara, di mana elite menggunakan mekanisme negara untuk mengekstraksi nilai surplus secara langsung dari rakyat melalui korupsi, penggelapan, dan pengisapan sumber daya publik. Dalam sistem ini,

hukum dan institusi hanya menjadi alat legalisasi dari akumulasi kekayaan secara tidak sah, yang tetap berlangsung karena struktur kelas yang timpang.

Kleptokrasi tidak bisa dipahami hanya sebagai penyimpangan moral atau hukum, tetapi sebagai bagian dari logika sistem kapitalisme di mana akumulasi kekayaan menjadi tujuan utama. Perspektif Marxian menolak pendekatan normatif yang memisahkan antara korup dan tidak korup, dan lebih menekankan pada bagaimana struktur kepemilikan dan relasi produksi memungkinkan terjadinya konsentrasi kekuasaan dan akumulasi kekayaan secara sistematis.

Dengan demikian, analisis Marxian menurut teori yang dikemukakan oleh Karimi (2020) menempatkan oligarki dan kleptokrasi sebagai konsekuensi dari relasi kelas dalam kapitalisme. Negara bukanlah penengah, tetapi aktor aktif dalam mempertahankan ketimpangan, menjadikan analisis kelas dan struktur kepemilikan sebagai pusat dari pemahaman terhadap gejala-gejala seperti korupsi sistemik, penguasaan sumber daya oleh elite, dan demokrasi yang hanya bersifat prosedural.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu studi pustaka (*library research*), dan metode pengumpulan data dan informasi mengenai sumber – sumber tertulis yang relevan dan kredibel.

Pendekatan ini dipadukan dengan perspektif sosiologis kritis, khususnya yang membahas mengenai teori kelas dalam perspektif Marxian untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan kleptokrasi dan oligarki secara struktural. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah yang membahas mengenai oligarki, *kleptokratis* dan Marxisme. Kemudian ditambah dengan menggunakan bahan laporan riset dari berbagai lembaga, artikel, sosial media, dokumen hukum dan instrumen lainnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis kritis (*critical discourse analysis*) untuk membaca teks dan narasi dominan dalam wacana politik dan media yang mencerminkan legitimasi kekuasaan elite. Ditambah dengan menggunakan analisis struktural Marxian yang mengacu pada data yang dianalisis dengan melihat struktur relasi kelas antara elite politik-ekonomi dan masyarakat kelas bawah, serta bagaimana negara bertindak sebagai alat kelas dominan. Dan yang terakhir teknik analisis yang digunakan adalah teknik interpretatif-historis yang mana peneliti menafsirkan data dalam konteks sejarah politik-ekonomi Indonesia untuk melihat pola berulang dari konsolidasi dan akumulasi kekuasaan oleh elite.

PEMBAHASAN

Oligarki di Indonesia mulai mengakar kuat sejak masa Orde Baru, ketika Presiden Soeharto menciptakan jaringan kekuasaan yang menggabungkan militer, birokrasi, dan konglomerat dalam sebuah sistem patronase yang kuat. Menurut Rozaki (2021) Kelompok elite ekonomi-politik ini mendapat kemudahan akses terhadap sumber daya negara, proyek-proyek besar, dan kebijakan yang mendukung kepentingan mereka. Pasca-Reformasi, meski struktur formal pemerintahan berubah dan demokratisasi berlangsung, warisan oligarkis tidak hilang.

Justru, elite lama bertransformasi dengan wajah baru: mereka masuk ke partai politik, membiayai kampanye, dan mengendalikan parlemen serta eksekutif melalui praktik-praktik transaksional. Reformasi, alih-alih mendemokratisasi kekuasaan, malah menjadi peluang bagi oligarki memperluas jejaringnya.

Setelah kejatuhan Soeharto pada 1998 dan dimulainya Reformasi, Indonesia beralih ke demokrasi yang lebih terbuka. Namun, oligarki tidak lenyap; ia beradaptasi dengan menyusup ke partai politik, membiayai kampanye, dan mempertahankan pengaruh di tingkat pusat dan daerah. Banyak pengusaha Orde Baru kini menduduki posisi strategis dalam politik atau mendukung kandidat yang melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, meskipun berdemokrasi, struktur oligarkis tetap bertahan dalam bentuk yang lebih terselubung.

Elite politik dan ekonomi dalam teori Warijo (2020) memainkan peran sentral dalam menjaga status *quo* kekuasaan dengan cara saling menopang. Pengusaha besar membiayai partai dan kandidat, sementara politisi memberikan timbal balik berupa akses terhadap regulasi, proyek pemerintah, dan konsesi sumber daya alam. Kolaborasi ini menciptakan lingkaran kekuasaan yang tertutup dan eksklusif. Mereka mengendalikan media, membentuk opini publik, dan menekan gerakan rakyat yang mencoba mendobrak dominasi tersebut. Sistem hukum pun kerap dilumpuhkan atau dibajak untuk melindungi kepentingan mereka, menjadikan hukum sebagai alat legitimasi, bukan keadilan.

Dengan kekayaan dan jaringan luas, mereka memengaruhi kebijakan dan undang-undang agar sesuai dengan kepentingan mereka, mencegah perubahan yang mengancam dominasi mereka. Mereka mendanai kampanye politik, mendukung kandidat yang loyal, atau bahkan terjun langsung ke politik sebagai anggota parlemen, pejabat, atau pemimpin partai. Contohnya, revisi regulasi yang mempermudah investasi asing sering dirancang untuk mengakomodasi bisnis elit. Aliansi lintas sektoral dengan militer dan birokrasi juga memperkuat posisi mereka, memastikan reformasi yang berpotensi mengguncang sistem dihalangi atau diperlambat. Akibatnya, kekayaan dan kekuasaan tetap terkonsentrasi, sementara upaya perubahan struktural tersendat.

Kekuasaan oligarkis secara perlahan bermetamorfosis menjadi *kleptokratis* ketika kontrol elite terhadap politik digunakan untuk menjarah sumber daya negara secara sistematis. Politik uang menjadi sarana utama untuk mempertahankan posisi, di mana setiap jabatan atau proyek dibeli dan dijual. Penyalahgunaan anggaran publik dilakukan melalui *mark-up* proyek, fiktifisasi program, hingga penyuapan dalam pengadaan barang dan jasa. Korupsi tak lagi terjadi secara individual, tetapi melibatkan jaringan besar lintas lembaga mulai dari legislatif, eksekutif, hingga swasta. Ini menjadikan korupsi sebagai bagian integral dari sistem kekuasaan, bukan penyimpangan.

Menurut teori yang dikembangkan oleh Kholis (2020) kekuasaan oligarkis di Indonesia sering bermetamorfosis menjadi kleptokrasi, di mana elite menyalahgunakan posisi untuk memperkaya diri melalui korupsi sistemik. Politik uang menjadi alat utama, dengan elite membeli suara, memengaruhi pemilu, atau menyuap pejabat untuk kontrak bisnis. Penyalahgunaan anggaran publik juga marak, dengan dana publik dialihkan ke proyek fiktif atau perusahaan cangkang milik kroni. Korupsi ini melibatkan jaringan politisi, birokrat, dan

pengusaha yang berkolaborasi mengeksploitasi sumber daya negara. Misalnya, tender proyek infrastruktur besar sering dimanipulasi untuk menguntungkan perusahaan terafiliasi, dengan suap mengalir ke pejabat terkait. Kleptokrasi ini bukan sekadar korupsi sporadis, melainkan sistem terstruktur yang menjadikan pencurian kekayaan negara sebagai pilar kekuasaan elit.

Beberapa kasus korupsi terbaru menunjukkan secara gamblang bagaimana elite politik membentuk aliansi pragmatis dengan pengusaha dan birokrat. Contoh mencolok adalah keterlibatan Harvey Moeis suami artis Sandra Dewi yang terseret dalam kasus korupsi tata niaga timah bersama PT Timah Tbk. Harvey disebut memiliki kedekatan dengan pejabat negara dan pengusaha tambang, serta memainkan peran sebagai perantara kekuasaan dan modal. Dalam kasus lain, seperti kasus Pertamina dan Antam, muncul nama-nama pejabat tinggi dan orang-orang yang memiliki hubungan politik yang kuat. Mereka memanfaatkan posisi dan koneksi untuk memuluskan proyek-proyek yang berujung pada penjarahan sumber daya dan kerugian besar bagi negara.

Dalam skala global, *kleptokratis* terjadi pada Sani Abacha, mantan diktator militer Nigeria, adalah contoh nyata kleptokrasi. Selama masa kekuasaannya, Abacha diduga menggelapkan dana publik senilai lebih dari \$3–5 miliar, yang disalurkan ke rekening bank di luar negeri, termasuk di Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Dana ini berasal dari anggaran negara, keuntungan minyak (sumber pendapatan utama Nigeria), dan kontrak-kontrak fiktif. Abacha menunjuk keluarga dan sekutu dekat untuk mengelola posisi kunci, memastikan aliran dana ke lingkaran dalamnya. Hukum dan institusi independen ditekan, sementara rakyat Nigeria menghadapi kemiskinan ekstrem. Setelah kematian Abacha pada 1998, pemerintah Nigeria berupaya memulihkan aset yang dicuri, tetapi hanya sebagian yang berhasil dikembalikan. Kleptokrasi Abacha melemahkan ekonomi Nigeria dan memperburuk ketimpangan sosial. Kasus ini mendorong kerja sama internasional untuk melacak aset curian, dengan Swiss dan negara lain membantu mengembalikan sebagian dana ke Nigeria, meskipun prosesnya panjang dan kompleks.

Mofferz (2020) berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia, alih-alih menjadi alat distribusi kekuasaan yang adil, justru dimanipulasi menjadi instrumen legitimasi bagi oligarki. Pemilu digunakan sebagai ajang formalitas untuk mempertahankan kekuasaan elite, dengan biaya politik yang sangat mahal dan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal besar. Partai politik bertransformasi menjadi kendaraan bisnis kekuasaan, bukan sebagai institusi ideologis. Akibatnya, masyarakat tidak benar-benar memilih wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingannya, tetapi justru memproduksi politisi yang tunduk pada kepentingan pemodal dan kelompok oligarkis yang mendanai mereka.

Media yang mereka kuasai membentuk opini publik dan meredam kritik, sementara lembaga pengawas seperti KPK dilemahkan untuk melindungi kepentingan mereka. Akibatnya, demokrasi menjadi formalitas belaka rakyat diberi ilusi pilihan, tetapi kekuasaan tetap di tangan elit. Sistem ini menjadikan demokrasi alat untuk melanggengkan, bukan menantang, oligarki korup. Politik elektoral di Indonesia telah menjadi sarana bagi elite untuk mengukuhkan dan memperluas jangkauan kekuasaannya. Pemilu sering kali didominasi oleh politik uang, kampanye populis tanpa substansi, serta mobilisasi massa berbasis loyalitas dan patronase. Elite

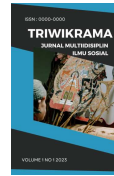
memanfaatkan sistem pemilu untuk merekrut figur-figur yang dapat dikendalikan, seperti selebritas atau tokoh agama, yang memiliki daya tarik elektoral tapi minim resistensi terhadap pengaruh modal. Dengan cara ini, mereka bisa mengontrol kebijakan publik dari balik layar, tanpa harus tampil secara langsung. Praktik ini mempersempit ruang demokrasi substantif dan memperparah ketimpangan kekuasaan di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, teori Zamroni (2022) menyatakan bahwa kelas dominan dapat diidentifikasi sebagai borjuis elite politik-ekonomi, yakni mereka yang menguasai alat produksi sekaligus memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan politik. Kelompok ini terdiri dari pengusaha besar, pemilik modal, serta politisi dan birokrat yang saling berkolaborasi demi melanggengkan dominasi mereka atas kekayaan dan kebijakan negara. Di sisi lain, kelas tertindas mencakup proletariat perkotaan, buruh pabrik, petani kecil, pekerja informal, hingga masyarakat miskin kota dan desa. Mereka tidak memiliki alat produksi dan hidup dari menjual tenaga kerja, sering kali tanpa perlindungan memadai dari negara yang justru berpihak pada kepentingan kelas dominan.

Dalam perspektif Marxian, negara bukanlah institusi netral yang menjembatani kepentingan semua golongan, melainkan alat kelas dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan kelas tertindas. Negara tampil seolah-olah sebagai penjaga kepentingan umum, padahal kebijakan, regulasi, hingga sistem hukum yang dibangun lebih banyak menguntungkan pemilik modal dan elite politik. Lembaga negara seperti parlemen, aparat penegak hukum, bahkan sistem pendidikan, dikendalikan oleh kekuatan yang bekerja demi melanggengkan relasi kuasa dan kepemilikan yang timpang.

Di Indonesia, negara telah menjadi instrumen efektif bagi elite untuk mengamankan dan memperluas kekayaan mereka melalui kebijakan yang disusun secara *top-down* dan transaksional. Proyek-proyek infrastruktur, perizinan sumber daya alam, hingga penyusunan undang-undang kerap ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada korporasi besar dan kroni politik, bukan demi kesejahteraan rakyat. Dalam banyak kasus, menurut Hutabarat (2023) badan-badan negara justru difungsikan sebagai pelayan korporasi dan bukan publik, menjadikan fungsi negara sebagai pelindung rakyat kehilangan makna sejatinya. Dengan mengendalikan alat-alat negara, kelas dominan memastikan bahwa kekayaan dan kekuasaan tetap terkonsentrasi di tangan mereka, sering kali dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.

Logika akumulasi kapital yang inheren dalam sistem kapitalisme mendorong elite untuk terus mencari cara meningkatkan profit, bahkan jika itu harus mengorbankan kepentingan publik. Kekuasaan negara dijadikan sarana strategis untuk menciptakan "pasar" baru melalui privatisasi layanan publik, liberalisasi ekonomi, atau deregulasi sumber daya alam. Dalam praktiknya, elite menggunakan instrumen negara untuk mengamankan konsesi, mengontrol perizinan, dan menekan resistensi rakyat. Negara tidak lagi menjadi penyeimbang, tetapi menjadi mekanisme distribusi keuntungan bagi elite dalam siklus akumulasi kapital yang tak henti.



Karl Marx menyebut *primitive accumulation* sebagai proses perampasan awal yang memungkinkan munculnya kapitalisme, misalnya melalui pengusiran petani dari tanah mereka. Dalam versi modernnya di Indonesia, dalam teori Solapari (2024) hal ini tercermin melalui eksploitasi sumber daya politik yaitu kebijakan dan regulasi dikuasai elite untuk merampas tanah, hutan, tambang, serta ruang hidup masyarakat. Proyek seperti *food estate*, tambang nikel, hingga IKN menjadi contoh di mana negara berfungsi sebagai pelancar akumulasi awal kapital bagi investor, sementara masyarakat adat, petani, dan nelayan dikorbankan demi pembangunan.

Kelas dominan menggunakan media, pendidikan, dan hukum sebagai alat untuk menyamarkan kekuasaan korup mereka agar tampak sah dan legal. Media yang dikuasai elite menyebarkan narasi yang mendukung status *quo*, sering kali melalui propaganda yang memutarbalikkan fakta demi kepentingan mereka. Aparatus ideologis negara seperti media, pendidikan, dan hukum memainkan peran penting dalam menciptakan narasi hegemonik yang membungkus kekuasaan oligarkis seolah-olah sah, wajar, dan legal. Media arus utama sering kali menjadi corong elite, menggiring opini publik untuk mendukung kebijakan yang sebenarnya merugikan rakyat. Sistem pendidikan didesain untuk membentuk warga negara yang patuh dan tidak kritis terhadap struktur ketimpangan. Sementara itu, hukum digunakan secara selektif seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dengan demikian, sistem ini bekerja dalam diam untuk menormalkan korupsi struktural dan ketimpangan sebagai realitas yang tidak bisa diganggu gugat.

Konsep *false consciousness* dalam teori Lubis (2025) menggambarkan bagaimana kelas tertindas tidak menyadari bahwa mereka sedang tertindas karena pola pikir mereka telah dibentuk oleh ideologi dominan milik kelas penguasa. Masyarakat diajarkan untuk melihat keberhasilan sebagai hasil kerja keras individual, bukan hasil dari struktur sosial yang timpang. Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri atas kemiskinan, bukan sistem. Media dan pendidikan menanamkan nilai-nilai kompetitif, konsumtif, dan pasrah pada elitisme. Akibatnya, solidaritas kelas melemah, perlawanan struktural terhambat, dan sistem *oligarkis-kleptokratis* terus berlanjut tanpa perlawanan berarti dari rakyat. Kesadaran palsu ini melemahkan potensi perlawanan kolektif, memungkinkan kelas dominan untuk terus mempertahankan kekuasaan tanpa tantangan signifikan.

Dalam perspektif Marxian, sesuai dengan buku yang ditulis oleh Luturmas (2022) yang berjudul *Birokrasi Marxisme* menjelaskan bahwa negara tidak dilihat sebagai institusi yang netral atau berdiri di atas kelas, melainkan sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh kelas dominan untuk mempertahankan kepentingannya. Jika diinterpretasikan di Indonesia, oligarki politik-ekonomi merupakan representasi dari kelas borjuis lokal yang menguasai alat produksi sekaligus memiliki akses langsung terhadap kekuasaan negara. Oligarki ini terdiri dari aktor-aktor politik dan ekonomi yang berkolaborasi dalam membentuk kebijakan, mengontrol sumber daya dan mempengaruhi arah pembangunan negara. Relasi ini bersifat struktural dimana negara berfungsi sebagai komite eksekutif yang mengatur urutan bersama kelas penguasa, seperti yang dikatakan oleh Karl Marx.

Negara tidak hanya menyediakan kerangka hukum dan regulasi yang menguntungkan elite, tetapi juga menggunakan aparatus represif dan ideologis untuk menjaga stabilitas sistem yang timpang. Dalam praktiknya, kekuasaan politik menjadi sarana bagi elite untuk melakukan akumulasi kapital, baik secara legal melalui legislasi maupun secara ilegal melalui korupsi dan penguasaan aset publik. Melalui kontrol terhadap partai politik, lembaga negara, serta media, oligarki mampu membentuk dan memelihara hegemoni, menciptakan ilusi bahwa kepentingan mereka adalah kepentingan nasional. Dengan demikian, dalam perspektif Marxian, relasi antara oligarki dan negara menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dan ekonomi bersatu dalam satu struktur kelas dominan yang menjadikan negara sebagai alat untuk memperkuat dan melanggengkan sistem kleptokrasi di Indonesia.

Bagi elite politik yang masih memiliki nurani dan tanggung jawab sejarah, penting untuk menyadari posisi mereka dalam struktur dominasi dan mengambil langkah menuju transformasi. Perubahan tidak bisa terjadi dari bawah saja tetapi dibutuhkan keberanian moral dari elite untuk melepaskan privilese sesaat demi kepentingan jangka panjang bangsa. Mereka bisa memulai dengan memperjuangkan transparansi anggaran, mendorong reformasi partai, memperluas partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan, dan memproteksi sektor-sektor vital dari eksploitasi kapital besar. Kesadaran kelas bukan hanya milik yang tertindas elite pun harus sadar bahwa mempertahankan status *quo* berarti ikut bertanggung jawab atas kerusakan sistemik yang menimpa masa depan negara.

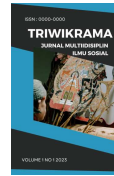
PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kleptokrasi di Indonesia merupakan kelanjutan dari sistem oligarki yang telah mengakar sejak masa Orde Baru dan bertransformasi dalam kerangka demokrasi pasca-reformasi. Dengan perspektif Marxian, kleptokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk penyimpangan moral atau hukum, melainkan sebagai ekspresi struktural dari dominasi kelas borjuis yang menguasai alat produksi dan instrumen negara. Negara, dalam konteks ini, bukanlah institusi netral, melainkan alat kelas penguasa untuk mempertahankan hegemoni dan mengamankan akumulasi kapital. Melalui sistem politik yang transaksional, kontrol terhadap media, dan pelemahan lembaga pengawas, elite berhasil menciptakan lingkaran kekuasaan yang tertutup, yang memperkuat kleptokrasi sebagai sistem kekuasaan yang terstruktur. Akibatnya, demokrasi hanya bersifat prosedural dan gagal menghasilkan keadilan sosial yang substantif. Ketimpangan sosial-ekonomi semakin melebar, dan rakyat diposisikan dalam kesadaran palsu yang melemahkan potensi perlawanan terhadap sistem tersebut.

Saran

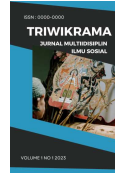
Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan reformasi struktural yang menyeluruh terhadap sistem politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia guna memutus dominasi oligarki *kleptokratis*. Perbaikan harus dimulai dari pembenahan mekanisme pendanaan politik, penghapusan praktik politik uang, serta penguatan institusi pengawas yang independen. Di samping itu, penting untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat melalui pendidikan dan



literasi media yang mendorong kesadaran kelas serta mampu menantang ideologi dominan yang melegitimasi ketimpangan. Lembaga penegak hukum harus dijamin independensinya agar mampu menindak jaringan korupsi secara adil dan tegas. Partisipasi rakyat juga harus ditingkatkan, tidak hanya sebatas pemilu, tetapi melalui keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan anggaran. Akhirnya, elite politik dan ekonomi perlu disadarkan akan tanggung jawab sejarah mereka, serta didorong untuk mengambil langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hanya melalui kerja sama antara rakyat yang sadar dan elite yang bermoral, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia Penyelenggaraan Pemerintahan*. Alprin.
- As' ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). "Oligarki dan jaringan patronase: dinamika kebijakan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu". *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1-17.
- Hidayat, E. (2020). *Oligarki dalam kekuasaan di Pilkadaes*. Airlangga University Press.
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). "Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.
- Karimi, A. F., & Efendi, D. (Eds.). (2020). *Membaca Indonesia: Esai-Esai tentang Negara, Pemerintah, Rakyat, dan Tanah Airnya*. Caremedia Communication.
- Kholis, N., Azra, A., Hasan, N., Qodir, Z., Qibtyah, A., Sadzali, A., & Min Fadhli Robby, H. (2020). *Islam Indonesia 2020*.
- Kleptocracy. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved October 27, 2023, from <https://en.wikipedia.org/wiki/Kleptocracy>
- Koho, I. R. (2021). "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia". *Lensa*, 15(1), 60-73.
- Lubis, N. A., Aini, R. A., & Raja, R. S. R. L. (2025). "Kritik Sosial Terhadap Kapitalisme: Analisis Puisi di Negeri Amplop Karya Mustofa Bisri dalam Teori Karl Marx". *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 414-420.
- Mardizal, J., & Ramatni, A. (2024). *Sosiologi Pendidikan*. Jonni Mardizal.
- Mofferz, M. W. (2020). "Meretas Makna Post-Truth: Analisis Kontekstual Hoaks, Emosi Sosial dan Populisme Agama". *Societas dei: jurnal agama dan masyarakat*, 7(1), 3-3.
- Nugroho, M. B. A., & Hosnah, A. U. (2024). "PROBLEMATIKA OLIGARKI DALAM PARTAI POLITIK YANG MEMICU LAHIRNYA TINDAK PIDANA KORUPSI". *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(2), 31-42.
- Poti, J. (2020). "Ekonomi politik, media dan ruang publik". *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 13(2).



- Putri, K., Hanifan, H. Z., & Habibah, S. Z. N. (2025). "Analisis Eksistensi Hashim Sujono Djojohadikusumo Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara: Studi Kasus Kepemilikan HPH dan HGB Di Kalimantan Timur". *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(1), 279-295.
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum: Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad 20*. Nuansa Cendekia.
- Rozaki, A. (2021). *Islam, oligarki politik, dan perlawanan sosial*. IRCiSoD.
- Solapari, N., Nazhiah, A., Adzkia, Z., Niluh, R., & Gracella, L. (2024). "Program Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke". *Jurnal Inovasi Global*, 2(12), 2080-2098.
- Warjio, P. D. (2020). *TATA KELOLA PARTAI: BAGAIMANA PARTAI POLITIK BEKERJA DALAM GELOMBANG DEMOKRASI?*. Gerhana Publishing.
- Zamroni, M. (2022). *Relasi kuasa media politik: kontestasi politik dalam redaksi berita televisi*. Prenada Media.